

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA  
DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



**Oleh :**

**ELFITRI**

**BP/NIM : 2006/73961**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

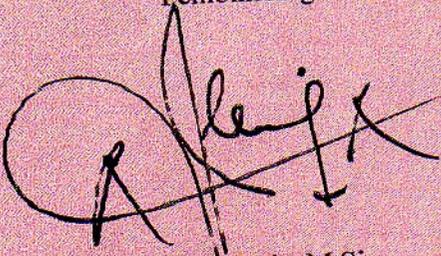
**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA  
DI SUMATERA BARAT**

NAMA : ELFITRI  
TM / NIM : 2006 / 73961  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Januari 2011

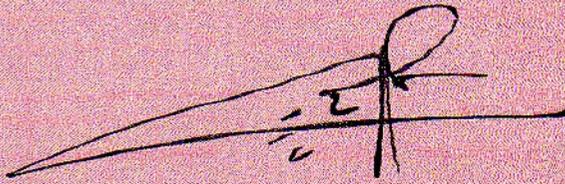
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Idris, M.Si  
NIP. 19610703 198503 1 005

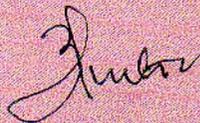
Pembimbing II



Drs. Zul Azhar, M.Si  
NIP. 19590805 198503 1 006

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S  
NIP. 19610502 198601 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi  
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Judul : ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Nama : Elfitri

TM / NIM : 2006 / 73961

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2011

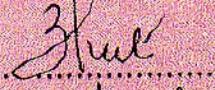
### Tim Penguji

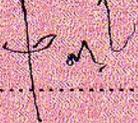
	Nama
1. Ketua	Dr. H. Idris, M.Si
2. Sekretaris	Drs. Zul Azhar, M.Si
3. Anggota	Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
4. Anggota	Novya Zulva Riani, SE, M.Si

Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 

4. 

## ABSTRAK

**Elfitri (2006/73961) : Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Dr. H. Idris, M.Si dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, (2) Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, (3) Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif, dimana penulis hanya menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan *pooled the data* dari tahun 2005–2008. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi dan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*), pada tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 0,05$ ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ( $t_{hitung} = 2,355 > t_{tabel} = 2,000$ ) dengan prob  $0,0220 < \alpha = 0,05$  dengan tingkat pengaruh 0,376 persen. (2) Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ( $t_{hitung} = 7,411 > t_{tabel} = 2,000$ ) dengan prob  $0,0000 < \alpha = 0,05$  dengan tingkat pengaruh 1,957 persen. Dan (3) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ( $F_{hitung} = 56,837 > F_{tabel} = 3,15$ ). Sumbangan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 66,60 persen dan sisanya 32,30 persen lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada pemerintah untuk (1) Meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola/bekerjasama dengan pihak-pihak yang mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengimbangi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat. (2) Pembentukan badan usaha atau perusahaan daerah oleh Provinsi Sumatera Barat dengan mengelola usaha-usaha yang dimungkinkan dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. (3) Meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan pada ALLAH SWT karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “Analisi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat”. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. H Idris, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zul Azhar M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak dan ibu Dosen penguji skripsi yaitu Bapak Dr. H. Idris, M.Si, Bapak Drs. Zul Ahar, M.Si, Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.Si dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Akirmen Bus, M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf pengajar dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah banyak membantu penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
7. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati serta semua keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Ekonomi Pembangunan angkatan 2006 yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15

### BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Teori .....	16
1. Defenisi Desentralisasi Fiskal .....	16
2. Indikator Desentralisasi Fiskal .....	24
3. Desentralisasi Fiskal Di Indonesia.....	25
4. Penerimaan Daerah .....	28

(a) Pendapatan asli daerah .....	28
(b) Dana perimbangan .....	31
(i) Dana bagi hasil .....	31
(ii) Dana alokasi umum .....	32
(iii) Dana alokasi khusus .....	32
(c) Lain-lain pendapatan .....	33
5. Pertumbuhan Ekonomi.....	33
6. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi .....	36
7. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi .....	42
8. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	44
B. Temuan Penelitian Sejenis .....	46
C. Kerangka Konseptual .....	47
D. Hipotesis Penelitian .....	50

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
C. Variabel dan Jenis Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Defenisi Operasional .....	53
F. Teknik Analisis Data .....	55

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	64
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	64
a. Keadaan Geografis .....	64
b. Batas Administratif .....	65
c. Kependudukan dan ketenagakerjaan.....	68
2. Analisis Deskriptif .....	70
a. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat .....	70
b. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat....	72
c. Perkembangan Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat .....	75
3. Analisis Induktif .....	77
a. Uji Asumsi Klasik .....	77
1) Uji Multikolinearitas .....	77
2) Uji Heterokedastisitas .....	78
3) Uji Autokorelasi .....	79
b. Uji Prasyarat Analisis .....	80
1) Uji Normalitas Sebaran Data .....	80
c. Uji Signifikansi Fixed Effect Atau Random Effect .....	81
d. Model Regresi Dan Estimasi .....	82
e. Uji Hipotesis .....	84
1) Uji t .....	84
2) Uji F .....	85

B. Pembahasan .....	86
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat .....	86
2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat .....	89
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.....	90

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Sumatera Barat Tahun 2001-2008 (Dalam Juta Rupiah) .....	6
1.2 Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001- 2008 (Dalam Juta Rupiah) .....	9
1.3 Komponen-komponen Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001- 2008 (Dalam Juta Rupiah) .....	11
3.1 Klasifikasi Nilai d Durbin–Watson .....	57
4.1 Laju Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2008 (Dalam Persen).....	71
4.2 Laju Perkembangan Nilai Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2008 (Dalam Persen).....	74
4.3 Laju Perkembangan Dana Perimbangan Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2008 (Dalam Persen).....	76
4.4 Hasil Estimasi Untuk Uji Multikolinearitas .....	78
4.5 Hasil Estimasi Untuk Uji Heterokedastisitas .....	79
4.6 Hasil Estimasi Untuk Uji Autokorelasi .....	80
4.7 Hasil Uji Normalitas Dengan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> ....	81
4.8 Hasil Estimasi Uji Hausman.....	81
4.9 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1	Komponen Penerimaan Daerah Di Era Desentralisasi Fiskal ..... 27
2.2	Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat ... 49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Data .....	95
2. Tabulasi Data Logaritma.....	97
3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	99
4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	103
5. Tabel Distribusi t.....	106
6. Tabel Distribusi F .....	107
7. Surat Pembimbing Skripsi .....	108
8. Surat Izin Penelitian dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat .....	110

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu hasil studi desentralisasi fiskal seringkali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama diantara para peneliti dan peminat desentralisasi. Ada silang pendapat dengan masing-masing pihak yang memiliki argumentasi logis serta telah membuktikannya secara empiris.

Secara prinsipil, munculnya gagasan tentang desentralisasi dikarenakan struktur politik yang sentralistis cenderung melakukan kekuasaan politik pada tangan pemerintah pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hidayat, 2005). pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan

dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di Negara dunia ketiga.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 januari 2001. Proses pelaksanaannya juga diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru, yakni UU no. 32 tahun 2004 mengganti UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU no. 33 tahun 2004 mengganti UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD). Perubahan terutama berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dengan lahirnya kedua UU ini, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal, yakni hubungan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, maupun hubungan secara horisontal antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif baik ditingkat pusat maupun Daerah .

Titik tolak desentralisasi di indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II), dengan tiga dasar pertimbangan, yaitu, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis minim, dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif, dan yang terakhir adalah karena Dati II adalah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang mengetahui kebutuhan

dan potensi rakyatnya. Aspirasi rakyat akan mudah dan cepat terekam, dan kemudian akan diterjemahkan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi aspirasi rakyat tersebut. Dengan demikian, keuntungan dari efisiensi ini akan menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada tingkat lokal yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan nasional. Namun pesatnya peningkatan anggaran yang dikelola daerah, sudah selayaknya perlu diikuti oleh peningkatan kemampuan dari pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan penerimaan daerah secara optimal.

Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya PAD dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, karena berasal dari pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga belum mengizinkan penerbitan utang daerah.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Desentralisasi fiskal harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehubungan dengan itu, Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya berdasarkan harga konstan. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang berada di kawasan Indonesia di bagian barat yang melaksanakan sistem desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada era desentralisasi dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dari tahun ketahun. Begitu juga dengan Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sumatera Barat ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan baik dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama era desentralisasi dari tahun 2001 hingga tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Sumatera Barat Tahun 2001-2008 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	Laju Pert. (%)	Pendapatan Asli Daerah	Laju Pert. (%)	Dana Perimbangan	Laju Pert. (%)
2001	23,727,373.90	-	140,763.00	-	263,570.00	-
2002	24,840,187.70	4.69	213,254.00	51.49	269,752.00	2.34
2003	26,146,781.60	5.26	281,450.71	31.98	282,134.39	4.59
2004	27,578,136.50	5.47	375,074.88	33.26	296,263.74	5.01
2005	29,159,480.50	5.73	448,279.01	19.52	310,066.30	4.66
2006	30,949,945.10	6.14	494,929.54	10.41	554,231.88	78.75
2007	32,912,968.50	6.34	491,315.59	-0.73	621,337.72	12.11
2008	35,007,000.00	6.36	636,224.68	29.49	741,743.87	19.38

Sumber: BPS (data diolah)

Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menunjukkan angka sebesar 6.36 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan PDRB tertinggi sepanjang data pada Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Sumatera Barat mengalami peningkatan kemungkinan dapat disebabkan oleh jumlah pendapatan asli daerah yang meningkat pada tahun yang bersangkutan sebesar 29.49 persen. Perkembangan PDRB Sumatera Barat yang tinggi juga kemungkinan dapat disebabkan oleh laju perkembangan dana perimbangan Sumatera Barat yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 19.38 persen.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah Sumatera Barat berfluktuasi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Berfluktuasinya laju perkembangan pendapatan asli daerah kemungkinan dapat disebabkan oleh perkembangan dana perimbangan, pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah maupun penerimaan lain-lain yang berfluktuasi dari tahun ke tahun sepanjang data dalam Tabel 1.2.

Pada tahun 2007 laju pertumbuhan pendapatan asli daerah Sumatera Barat negatif sebesar 0.73 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah terendah sepanjang data pada Tabel 1.1. Ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah dana perimbangan yang meningkat pada tahun yang bersangkutan sebesar 12,11 persen. Perkembangan pendapatan asli daerah Sumatera Barat yang rendah juga kemungkinan dapat disebabkan oleh menurunnya penerimaan daerah dari pajak yaitu 0.5 persen pada tahun yang bersangkutan. Seperti yang diketahui bahwa penerimaan daerah yang besar merupakan dari pajak. Perkembangan pendapatan asli daerah yang negatif kemungkinan juga dapat disebabkan oleh penerimaan daerah dari penerimaan lain-lain yang negatif sebesar 64.8 persen pada tahun yang bersangkutan, dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Pada tahun 2002 laju pertumbuhan pendapatan asli daerah Sumatera Barat menunjukkan angka sebesar 51.49 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi sepanjang data pada Tabel 1.1. Ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah dana perimbangan yang rendah pada tahun yang bersangkutan sebesar 2,34 persen. Perkembangan pendapatan asli daerah yang tinggi kemungkinan juga dapat disebabkan oleh meningkatnya penerimaan daerah dari pajak, Retribusi dan hasil perusahaan milik daerah

masing-masing sebesar yaitu sebesar 52.6, 93.9 dan 151.9 persen pada tahun yang bersangkutan. Meningkatnya PAD diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Dana Perimbangan Sumatera Barat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 cenderung berfluktuasi. Berfluktuasinya laju perkembangan Dana Perimbangan Sumatera Barat kemungkinan dapat disebabkan oleh perkembangan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus yang berfluktuasi dari tahun ke tahun sepanjang data dalam Tabel 1.3

Pada tahun 2002 laju pertumbuhan Dana Perimbangan Sumatera Barat sebesar 2.34 persen yang merupakan perkembangan Dana Perimbangan terendah sepanjang data pada Tabel. Ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya nilai pendapatan asli daerah pada tahun yang bersangkutan sebesar 51.49 persen. Perkembangan dana perimbangan yang rendah kemungkinan juga dapat disebabkan oleh menurunnya dana alokasi umum pada tahun yang bersangkutan yaitu negatif sebesar 15.0 persen.

Pada tahun 2006 laju pertumbuhan Dana Perimbangan Sumatera Barat sebesar 78.75 persen yang merupakan perkembangan Dana Perimbangan tertinggi sepanjang data pada Tabel. Ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya dana alokasi umum yang diterima pemerintah pada tahun yang bersangkutan yaitu sebesar 92.7 persen. Perkembangan dana perimbangan

yang meningkat kemungkinan juga dapat disebabkan oleh turunnya nilai Pendapatan asli daerah pada tahun yang bersangkutan sebesar 10.41 persen.

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan penerimaan lain-lain berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 laju pertumbuhan pajak daerah Sumatera Barat sebesar 52,6 persen yang merupakan perkembangan pajak daerah tertinggi sepanjang data pada tabel. Ini kemungkinan dapat disebabkan oleh meningkatnya hasil perusahaan milik daerah sebesar 151,9 persen pada tahun bersangkutan. Kenaikan pajak daerah ini juga kemungkinan berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi (L. Jay Helms, 1985).

**Tabel 1.2 Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2008 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	Laju Pert. (%)	Retribusi Daerah	Laju Pert. (%)	Hsl Prsh.Mlk Daerah	Laju Pert. (%)	Pen. lain-lain	Laju Pert. (%)
2001	109,377	-	2,837	-	7,381	-	21,168	-
2002	166,909	52.6	5,501	93.9	18,597	151.9	22,247	5.09
2003	218,852	31.1	6,987	27.0	27,675	48.8	27,934	25.6
2004	307,314	40.4	8,105	16.0	26,063	-5.8	33,590	20.2
2005	375,966	22.3	9,405	16.0	25,812	-0.96	37,094	10.4
2006	409,139	8.8	10,785	14.7	25,574	-0.92	49,429	33.2
2007	411,331	0.5	33,168	207.5	29,397	14.94	17,418	-64.8
2008	513,232	24.8	59,278	78.7	36,548	24.3	27,165	55.9

Pada tahun 2007 laju pertumbuhan retribusi daerah Sumatera Barat sebesar 207,5 persen yang merupakan perkembangan retribusi daerah tertinggi sepanjang data pada tabel 1.2. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Pada tahun 2006 laju pertumbuhan retribusi daerah Sumatera Barat sebesar 14,7 persen yang merupakan perkembangan retribusi daerah terendah sepanjang data pada tabel 1.2. Ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan hasil perusahaan milik daerah yang negatif sebesar 0,92 persen pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan dana bagi hasil pajak, DAU dan DAK Sumatera Barat berfluktuasi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2004 laju pertumbuhan dana bagi hasil pajak Sumatera Barat sebesar 24,5 persen. Ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dari sebagian penerimaan perpajakan dan penerimaan sumber daya alam.

Pada tahun 2006 laju pertumbuhan DAU Sumatera Barat sebesar 92,7 persen yang merupakan perkembangan DAU tertinggi sepanjang data pada tabel 1.2. Ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan hasil perusahaan milik daerah yang negatif sebesar 0,92 persen pada tahun bersangkutan dan sebaliknya. Tingginya laju pertumbuhan DAU Sumatera Barat kemungkinan

juga dapat disebabkan oleh tingginya kesenjangan horizontal (antar daerah) dan kesenjangan vertikal (pusat-daerah).

**Tabel 1.3 Komponen-komponen Dana Perimbangan  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2008  
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Dana Bagi hasil pajak	Laju Pert. (%)	DAU	Laju Pert. (%)	DAK	Laju Pert. (%)
2001	33,888	-	227,682	-	2,000	-
2002	42,072	24.1	193,520	-15.0	34,160	1608
2003	49,805	18.4	227,630	17.6	4,700	-86.2
2004	62,014	24.5	234,249	2.9	-	-
2005	62,579	0.9	247,487	5.6	-	-
2006	77,202	23.4	477,029	92.7	-	-
2007	75,005	-2.8	546,332	14.5	-	-
2008	85,500	13.9	631,675	15.6	24,567	100

Pada tahun 2002 laju pertumbuhan DAK Sumatera Barat sebesar 1608 persen yang merupakan perkembangan DAK tertinggi sepanjang data pada tabel 1.3. ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan DAU yang negatif sebesar 15,0 persen pada tahun yang bersangkutan.

Meningkatnya penerimaan keuangan pemerintah daerah yang disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah di era otonomi daerah seharusnya memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Semakin besarnya penerimaan anggaran yang diiringi semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah diharapkan diikuti dengan peningkatan kinerja

perekonomian daerah yang juga akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan penerimaan keuangan daerah yang diikuti pemberian pelayanan publik yang mengalami peningkatan, diharapkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat pula. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri agar bisa bersaing dengan daerah lain diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah. Hal itu dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya jumlah pajak dan retribusi daerah dari tahun ketahun. Karena tidak bisa dipungkiri pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama penerimaan PAD terutama untuk daerah yang memiliki sumber daya alam terbatas. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang tinggi bisa menggambarkan membaiknya pertumbuhan PAD dari tahun ketahun.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Apabila nilai dari masing-masing variabel meningkat maka seharusnya peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila terjadi penurunan dari variabel-variabel tersebut penurunan juga terjadi terhadap PDRB, dari fenomena tersebut di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Mengingat pentingnya Keberhasilan pencapaian tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro daerah, maka berdasarkan uraian diatas dengan melihat perkembangan PDRB di Sumatera barat penulis tertarik untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal tersebut dalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejahteramana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ?
2. Sejahteramana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ?
3. Sejahteramana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pengembangan ilmu terutama ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi pembangunan.
2. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bagi peneliti lebih lanjut, terutama yang meneliti tentang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian Sumatera Barat berkaitan dengan desentralisasi fiskal, sehingga dapat membantu sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Defenisi Desentralisasi Fiskal**

Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Dalam perjalanannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberlakukan pada bulan desember 2004.

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson (dalam Zulyanto,2010:22) mendefinisikan desentralisasi adalah berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu Negara.

Sedangkan Mawhood (dalam Zulyanto, 2010:23) mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sementara, menurut Rondinelli dan Cheema (dalam Amin Pujiati, 2006:5) desentralisasi adalah "*the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations*".

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintah daerah sendiri.

Menurut Ebel dan Yilmaz (dalam Altito, 2010:18) ada tiga bentuk/variasi desentralisasi, dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu:

#### 1. *Decontretation*

Merupakan pelimpahan kewewenangan dari agen-agen pemerintah pusat yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah.

## 2. *Delegation*

Merupakan penunjukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat

## 3. *Devolution*

Merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi yang ketiga (*devolution*). Lebih lanjut Slinko (dalam Altito, 2010:19) menyatakan bahwa

*Under the concept of “fiscal decentralization” we understand the assignment of fiscal responsibilities to the lower levels of government, that is, the degree of regional (local) authonomy and the authority of local government to decide upon its own expenditure and its ability to generate local revenues.*

Pernyataan Slinko mempertegas pengertian desentralisasi fiskal, yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.

Menurut prawirosetoto (dalam Amin Pujiati,2006:5-6) desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public services*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.

Tujuan penerapan desentralisasi fiskal adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat bekerja dengan lebih baik (efisien) dalam kondisi tersebut (M. Ryaas Rasyid, 2005).

Menurut Mardiasmo (2002:59) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal , yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Menurut Dilliger dalam Amin Pujiati (2006: 6-7) pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi yaitu politik, fiskal, administratif, dan desentralisasi ekonomi. Semua empat tipe ada di berbagai bentuk dan kombinasi di berbagai negara, dalam negara, dan dalam sektor.

**a. Desentralisasi Politik**

Desentralisasi politik mengacu pada sejauh mana pemerintah pusat memungkinkan non lembaga pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi politik tertentu. Desentralisasi Politik bertujuan untuk memberikan warga negara atau wakil rakyat yang terpilih lebih banyak kekuatan di depan umum dalam pengambilan keputusan.

**b. Desentralisasi fiskal**

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup: a) *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah b) *Cofinancing* atau *coproduction*, di mana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja c) Transfer dari

pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam).

Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal harus dapat:

- (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan Pemerintah Daerah
- (2) dapat memenuhi aspirasi dari Daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional
- (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat Daerah
- (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar Daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap Daerah
- (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

#### **c. Desentralisasi administrasi**

Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber ke-uangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.

#### **d. Desentralisasi ekonomi**

Desentralisasi ekonomi mengacu pada kebijakan privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi

Salah satu visi desentralisasi adalah terkait masalah ekonomi yaitu harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan sumber dana lain (pinjaman/ bantuan luar negeri).

Menurut Syauckani (2004 : 47) Didalam pelaksanaan desentralisasi hak dan kewajiban daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
- (2) Memilih pimpinan daerah,
- (3) Mengelola aparatur daerah,
- (4) Mengelola kekayaan daerah,
- (5) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain di daerah,
- (6) Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah,dan
- (7) Mendapatkan hak lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing daerah diatas diharapkan dapat memberikan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peluang pemerintah daerah untuk membangun daerahnya di era otonomi ini cukup tinggi. Setidaknya dengan potensi-potensi penting di daerah, seperti tersediannya sumber daya alam yang melimpah, dan tenaga kerja yang banyak, investasi di daerah yang dapat dipacu secara proporsional. Keberadaan sumber daya alam di era otonomi dapat dipandang sebagai sumber pendapatan dan modal pembangunan. Karena pembangunan pada hakekatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pun harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian serta melibatkan masyarakat sebagai pengelola langsungnya.

## 2. Indikator Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel dan Yilmaz (dalam Altito, 2010:20) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variables*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga *size variables* yang umum digunakan, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP.

Lebih lanjut Ebel dan Yilmaz (bahwa baik penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah bukanlah indikator yang sempurna untuk mengukur desentralisasi fiskal. Slinko (dalam Altito,2010:21) memberikan penjelasan yang lengkap mengenai hal ini.

*The problem with the expansive decentralization is that local government usually does not have real degree of autonomy but act on behalf of the regional and federal governments. We also have problems with the revenue side estimation of fiscal decentralization since those also could be not the consequence of municipal ability to rise and assign taxes, but the consequence of the revenue-sharing policy of regional government.*

Meskipun kedua variabel tersebut bukanlah indikator desentralisasi fiskal yang sempurna, penelitian ini akan menggunakan *share* penerimaan daerah (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) untuk mengukur kemandirian fiskal daerah (derajat desentralisasi daerah). Sehubungan dengan itu, menurut Brata (dalam Gunawan, 2008:3) mengatakan “terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagian sumbangan dan bantuan”.

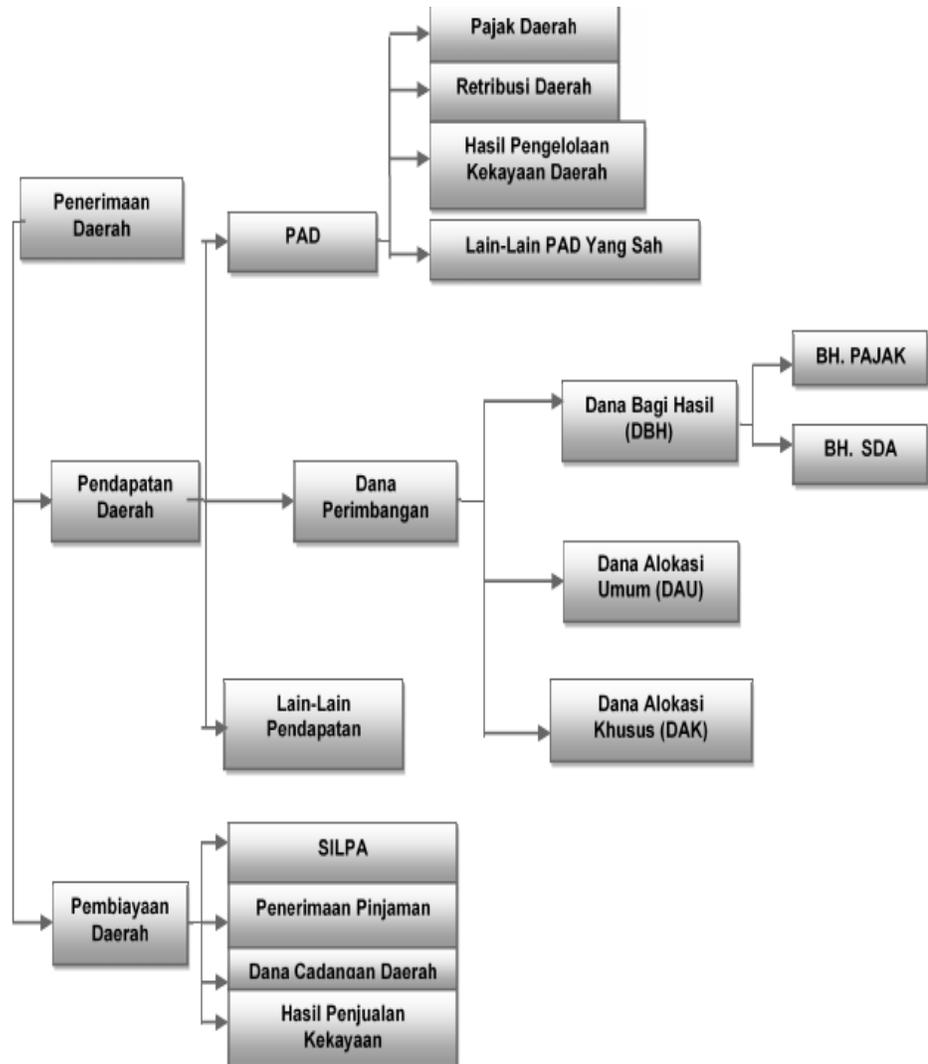
### **3. Desentralisasi Fiskal di Indonesia**

Prinsip Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman Negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Terminassian (dalam Zulyanto, 2010:27) bahwa banyak Negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut.

Dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di banyak Negara yang menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal dan memberikan jaminan kepada rakyat bahwa pelayanan publik akan semakin membaik dan rakyat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan (Bahl and Linn, 1998).

Mekanisme kebijakan transfer kedaerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal jenis transfer ke daerah dalam bentuk ini tercatat sebagai komponen terbesar dari dana transfer ke daerah (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut mardiasmo menjelaskan bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar penerimaan daerah dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber : UU nomor 33 tahun 2004 (dalam Zulyanto,2010:29)

**Gambar 2.1** Komponen Penerimaan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.

#### **4. Penerimaan Daerah**

Dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus). Menurut UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

##### **a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Menurut Halim (2004: 67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa PAD itu adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri.

Menurut Abdul dalam Fitri Yani (2001:85) menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor PAD memegang peranan yang sangat penting, karena melalui ini dapat dilihat sejauhmana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya, yang nantinya akan meningkatkan kinerja pembangunan didaerah tersebut. Sumber PAD terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang syah.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan upaya konvensional yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Perbedaan potensi ekonomi daerah yang cukup besar memungkinkan beberapa daerah tertentu untuk mengupayakan peningkatan PAD ini melalui upaya penggalan potensi ekonomi daerah yang ada dan belum banyak dimanfaatkan.

Menurut Sjafrizal (2008:249) mengatakan bahwa ada 3 upaya utama yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD suatu daerah, yaitu :

1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi.
2. Mencari kemungkinan penetapan jenis pajak baru sesuai dengan undang-undang berlaku.
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu.

PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal dengan tetap memenuhi prinsip keuangan negara (perpajakan)

agar pajak dan retribusi daerah tidak distortif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Robert A. Simanjuntak, 2005).

#### **b) Dana Perimbangan**

Pemberian sumber-sumber keuangan yang memadai tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada pendapatan asli daerah (PAD), namun juga perlu didukung oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal (Bahl, 2000: 25-26).

##### **i) Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan antara pusat dan daerah di bidang desentralisasi fiskal. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH), dibagi menjadi dua, yaitu:

##### **(1) Dana Bagi Hasil Pajak**

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal (11) disebutkan bahwa bagian daerah dari bagi hasil pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dalam negeri.

(2). Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, panas bumi, pertambangan umum (seperti batu bara, nikel, emas, dsb), hasil hutan dan hasil perikanan. Bagi hasil dilakukan antara pusat dengan daerah dimana SDA itu berada. Jadi, jadi daerah yang tidak memiliki SDA atau yang tidak berada dalam satu propinsi dengan daerah kaya, pada dasarnya tidak akan memperoleh bagian (Robert A. Simanjuntak, dalam Altito, 2010:23).

ii) Dana Alokasi Umum (DAU)

Tujuan pengalokasian DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia. Secara implisit, DAU bertujuan untuk menetralkan dampak peningkatan ketimpangan antar daerah sebagai akibat bagi hasil pajak dan SDA yang tidak merata. DAU untuk satu wilayah dialokasikan atas dasar celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar (Robert A. Simanjuntak dalam Altito, 2010:24).

iii) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana perimbangan yang berasal dari APBN (Hanif Nurcholis, 2005). Kriteria umum DAK adalah pembiayaan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional di

daerah, dimana sumbernya dinyatakan secara spesifik. DAK dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan daerah bias dituangkan dalam bentuk formula dan variablevariabelnya sebagaimana halnya DAU.

### **c. Lain-lain Pendapatan**

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD (Hanif Nurcholis dalam Altitto, 2010:24).

## **5. Pertumbuhan Ekonomi**

Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup (*standar of living*).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000:5).

Sementara itu, menurut Zaris (1987:82) pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestic regional bruto per kapita (PDRB per kapita).

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) dihitung dengan formulasi berikut ini:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots$$

Dimana :

$PDRB_t$  = PDRB pada tahun tertentu

$PDRB_{t-1}$  = PDRB pada tahun sebelumnya

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang terhadap output baik barang maupun jasa yang dihasilkan suatu Negara dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi dalam suatu periode atau kurun waktu tertentu.

Menurut Todaro (2003: 92) ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

a. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah yang meliputi kesuburan tanah, iklim, sumber air, kekayaan hutan dan sebagainya. Bagi pertumbuhan ekonomi sumber daya alam yang melimpah sangat penting. Tetapi kekayaan alam yang melimpah itu juga tidak menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi yang akan diharapkan, tetapi yang diperlukan adalah efisiensi sehingga suatu Negara dapat mengalami kemajuan.

b. Akumulasi Modal

Pembentukan modal adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Pembentukan modal akan memperlihatkan permintaan efektif, dan disisi lain dapat menciptakan efisiensi produksi bagi produksi masa yang akan datang. Proses pembentukan modal akan menghasilkan kenaikan output nasional dan sangat diperlukan dalam memenuhi permintaan penduduk yang semakin meningkat. Pembentukan modal ini berupa investasi dibidang barang modal yang tidak hanya meningkatkan produksi tapi dapat memperluas kesempatan kerja.

c. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi disuatu negara yang berkaitan dengan proses produksi didalam kegiatan ekonomi. Fungsi organisasi adalah sebagai pembuat peraturan guna tercapainya efisiensi ekonomi.

d. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi merupakan peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi, secara sederhana dapat dikatakan kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya perbaikan terhadap cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

## **6. Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi**

Dalam konteks negara kesatuan desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah.

Disisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan

masyarakat. Sedangkan disisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat pada pemerintah untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Menurut Pose et all (dalam Altito, 2010:47) terdapat banyak literatur yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejaterahan dan keuntungan ekonomi. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemerintah daerah (dengan asumsi lebih dekat dengan rakyat) lebih cakap dalam membuat kebijakan yang menentukan barang publik yang dibutuhkan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah menghasilkan fungsi alokasi yang lebih efisien.

Sehubungan dengan itu, World Bank (dalam Altito, 2010:47) menyatakan desentralisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Ada tiga cara desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Argumen pertama adalah desentralisasi akan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik, sehingga efek dinamisnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi. Selanjutnya bahwa desentralisasi dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi, yang mana akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga didapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan

ekonomi dan desentralisasi. Argumen yang berikutnya adalah bahwa negara sedang berkembang (NSB) memiliki sistem kelembagaan dan perekonomian yang berbeda dengan negara berkembang (NB), sehingga negara sedang berkembang tidak akan mendapat keuntungan dari desentralisasi. Hal ini terjadi karena susunan kelembagaan di negara-negara sedang berkembang tidak perlu memberikan sub insentif kepada pemerintah untuk menggunakan keuntungan informasi dalam merespon tindakan yang dilakukan. Alasan lain adalah karena pemerintah daerah di negara-negara sedang berkembang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, seperti misalnya pegawai pemerintah yang terlatih dalam mengelola anggaran yang lebih besar.

Menurut Oates (dalam Hadi Sasana ,2009:106-107) bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan.

Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga dikembangkan oleh Prud'Homme (dalam Zulyanto,2010:33) yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah di masa datang. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastuktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Lebih lanjut Prud'Homme menyatakan empat area yang menjadi dampak utama dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu;

1. Efisiensi ekonomi

Umumnya desentralisasi selalu dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Baik efisiensi alokasi, yaitu Pembangunan yang berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal akan menjamin efisiensi ekonomi.

2. Kestabilan ekonomi makro

3. Keadilan interpersonal dan interregional, dan

4. Efisiensi politik

Meskipun demikian, Thiessen (dalam Zulyanto,2010,37) juga memberikan berbagai pandangan yang memperingatkan kelemahan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai berikut;

1. Desentralisasi fiskal dapat memperkuat kesenjangan regional (*disparitas*) dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan atas tingkat pendapatan dan basis pajak antara wilayah dan daerah. Selanjutnya akan mendorong perbedaan dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan dan pelayanan publik lainnya serta mencegah penggunaan faktor-faktor produksi secara penuh termasuk modal manusia. Daerah kaya umumnya akan menyediakan layanan publik yang lebih baik, selain itu terdapat kecenderungan masyarakat daerah kaya untuk menghalau masuknya masyarakat yang berpendapatan rendah. Adanya perbedaan dan ketidakadilan dalam penyediaan barang publik yang mencakup kepentingan masyarakat secara luas dan lintas daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi per kapita.
2. Desentralisasi fiskal dapat menghasilkan keputusan-keputusan pemerintah dengan kualitas rendah, lebih banyak korupsi, dan meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemerintah pusat secara umum dapat mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, ada kasus-kasus di mana demokrasi lokal mungkin menawarkan kontrol yang kurang efektif oleh pejabat terpilih, karena pejabat di tingkat lokal lebih dekat kepada orang-orang dan karena itu mungkin lebih rentan terhadap pengaruh pribadi dan korupsi. Jika kualitas

pemerintah menurun, maka desentralisasi dapat meningkatkan inefisiensi.

3. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada negara-negara kecil dan berpendapatan rendah cenderung akan merugikan. Untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dibutuhkan biaya tetap (*fixed cost*) yang tidak sedikit sehingga dapat menghabiskan sebagian besar kapasitas anggaran yang sangat terbatas. Selain itu, terdapat ambang batas tingkat pembangunan ekonomi yang diperlukan agar desentralisasi fiskal dapat memberikan hasil memuaskan. Ambang batas ini bukan hanya karena adanya biaya tetap desentralisasi fiskal, tetapi juga karena pada tingkat pendapatan per kapita relatif rendah, kebutuhan untuk penyediaan barang dan jasa publik terfokus pada sedikit barang, sehingga mungkin secara umum tuntutan masyarakat relatif homogen. Perbedaan dalam preferensi individu untuk barang dan jasa publik juga mungkin relatif kecil sehingga pemerintah pusat memiliki semua informasi yang diperlukan untuk menciptakan efisiensi konsumsi dan produksi.
4. Desentralisasi fiskal dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan membuat kebijakan stabilisasi lebih sulit dilakukan berkaitan dengan penyesuaian fiskal untuk mengurangi ketimpangan struktural. Desentralisasi fiskal bahkan mungkin mendorong dan memperburuk ketimpangan struktural tersebut. Salah satu contoh ekstrem adalah ketika pemerintah daerah tertentu memberikan

pembebasan pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintahan daerah yang lain. Tindakan ini dapat memicu ketidakstabilan antar daerah. Di samping itu, koordinasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda mungkin sulit untuk dilakukan secara efektif dan tepat waktu, sehingga dalam jangka panjang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **7. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi**

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Sidik (dalam Gunawan, 2008:23) menyatakan bahwa dalam era otonomi idealnya PAD harus menjadi sumber penerimaan utama. Hal ini disebabkan sumber pendapatan lain dinilai terlalu berfluktuatif dan diluar kontrol (kewenangan) pemerintah.

Sehubungan dengan hal itu, Tambunan (dalam Bati, 2006:44) menyatakan bahwa PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (dalam Bati,2006:44) menyatakan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah.

Sehubungan dengan hal itu, Saragih (dalam Gunawan, 2008:19) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan hal itu, Bappenas (dalam Gunawan, 2008:19) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung.

Dengan demikian, besar atau kecilnya nilai daripada PAD dapat menentukan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada

Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

#### **8. Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi**

Tidak semua daerah menyambut baik kebijakan desentralisasi fiskal. Hal ini tidak disebabkan oleh enggannya daerah untuk memasuki era ini, namun lebih dikarenakan faktor kesiapan daerah. Oleh sebagian daerah, kebijakan ini dianggap terlalu terburu-buru mengingat hampir sebagian daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari belenggu krisis ekonomi. Dalam tahapan awal pemerintah pusat tidak langsung melepaskan daerah untuk menjadi mandiri. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan berupa dana perimbangan yang sangat besar kepada daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanjanya, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil (DBH).

Menurut Saragih (2003:55) Pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah, sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat.

Kebijakan pemberian dana perimbangan ini disatu sisi dimaknai positif, namun disisi lain justru menjadi diinsentif ataupun demotivasi bagi berbagai pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal itu, Nanga (dalam Priyo, 2007: 2 ) menyatakan bahwa kebijakan pemberian dana dalam jumlah sangat besar justru menyebabkan adanya kemalasan fiskal dikalangan pemerintah daerah. Akibatnya tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik, tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa jadi menjadi semakin sulit untuk dicapai mengingat berbagai hambatan itu.

Sementara itu, menurut Holtz Eakin et all (dalam Bati,2006:82) menyatakan ada keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Belanja modal digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Dan juga merupakan salah satu input produksi yang dapat menghasilkan output. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, pemberian dana perimbangan dapat mendorong pemerataan fiskal dan meningkatkan pendapatan perkapita yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## **B. Temuan Penelitian Sejenis**

Kajian penelitian yang relevan ini adalah bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian yang relevan dengan penelitian adalah:

Priyo Hari Adi (2005) dalam penelitiannya yang berjudul *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan ekonomi (studi pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali)* yang menggunakan data tahunan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 menemukan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Davoody, H & Zou, Z (1998) dalam jurnalnya yang berjudul *Fiscal Decentralization and Economic Growth* dengan 46 negara maju dan negara berkembang yang menggunakan data panel dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1989 menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri.

Woller dan Phillips (1998) dalam jurnalnya yang berjudul *Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth* dengan 23 negara berkembang yang menggunakan data tahunan dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1991 menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak

mempunyai dampak yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang.

Fritz Breuss dan Markus Eller (2004) dalam jurnalnya yang berjudul *Fiscal Decentralisation and Economic Growth* menyatakan bahwa ada efek ambivalent dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga sulit untuk menarik rekomendasi yang tepat tentang bagaimana desentralisasi yang optimal. Lebih lanjut Breuss dan Eller menyimpulkan bahwa tidak ada kejelasan atau hubungan otomatis desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau kerangka berfikir adalah sebuah konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Adapun variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), dana perimbangan ( $X_2$ ) sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai variabel terikat ( $Y$ ).

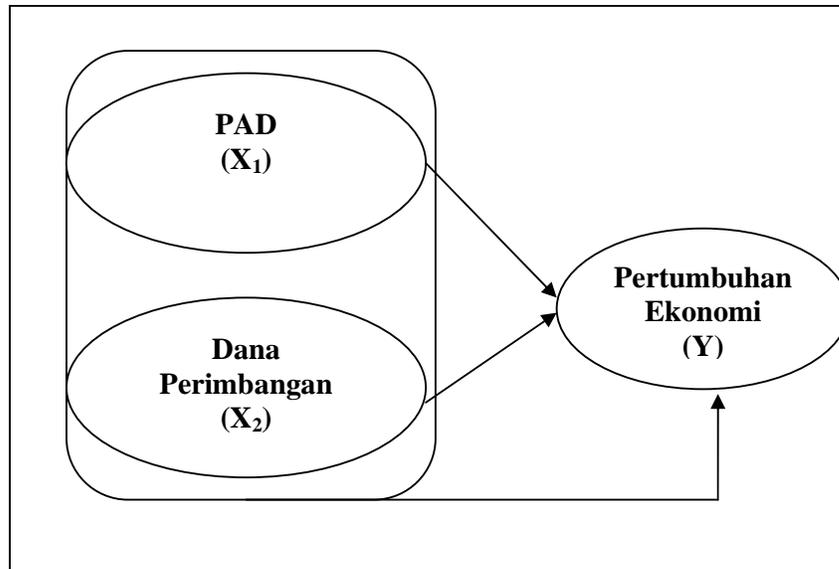
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Apabila jumlah Pendapatan

Asli Daerah meningkat maka penerimaan daerah juga meningkat baik dari pajak, retribusi serta pendapatan lain-lain yang syah, kemampuan daerah membiayai pembangunannya dalam hal investasi lebih besar sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera barat juga akan meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Peningkatan Dana Perimbangan akan memberikan keleluasaan untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. dana perimbangan akan meningkatkan Belanja Modal diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh Desentralisasi fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

## B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dibahas melalui penelitian ini.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat .

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu } \beta \neq 0$$

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (sig = 0,0220) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,376 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Semakin tinggi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sebaliknya semakin rendah pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (sig = 0,0000) dengan tingkat pengaruh sebesar 1,957 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Semakin tinggi dana perimbangan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sebaliknya semakin rendah dana perimbangan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

3. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (sig = 0,0000). Jadi Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dapat dipakai untuk memprediksi besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Namun dilihat dari nilai koefisiennya, dana perimbangan masih mendominasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan masih menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## **B. Saran**

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tingkat pendapatan asli daerah dengan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola/bekerjasama dengan pihak-pihak yang mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin.
2. Pembentukan badan usaha atau perusahaan daerah oleh Provinsi Sumatera Barat dengan mengelola usaha-usaha yang dimungkinkan dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang baru.
3. Dalam era desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk bisa melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, maka harus didukung dengan sumber-

sumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui: pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali)*. Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2008. *Sumatera Barat Dalam Angka Periode 2001–2008*. Padang.
- Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Utara). Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003, *Metode Riset Untuk bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- .(2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : Erlangga
- Nazir, Mohammad. 2002. *Metode Penelitian*. Darussalam : Ghalia Indonesia.
- Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Di Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Negeri Semarang.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, Hadi, (2005). “Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, antar Sektor di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol.12 No.2, September 2005.
- Septian, Gunawan Wahyudi. 2008. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta